

Rabu, 10 November 2010

Pengelolaan KP Terindikasi Korupsi

PONTIANAK. Kendati belum semua pihak yang terkait permasalahan Khatulistiwa Plaza (KP), Pansus DPRD Kota Pontianak telah menemukan adanya indikasi korupsi. Tetapi, belum diketahui secara pasti jumlah kerugian daerah dalam permasalahan pusat perbelanjaan tersebut.

"Kita sedang menghitung dan mengumpulkan data mengenai adanya kemungkinan korupsi dalam kasus KP ini. Karena kita melihat Pemkot sangat dirugikan dengan adanya pengelolaan yang dilakukan PT Seroja," kata Drs Erick S Martio SH MM, Ketua Pansus KP kepada Equator, kemarin (11/9).

Beranjak dari dugaan tersebut, Pansus KP pun berkunjung ke Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI pada 3 November lalu. Tujuan untuk mendapatkan penjelasan terkait berbagai persoalan. "Kita meminta penjelasan dari BPK, karena ini juga terkait aset Pemkot Pontianak," jelas Erick.

Dari pertemuan antara Pansus KP dengan BPK-RI itu, belum diperoleh informasi yang menguatkan ada atau tidaknya korupsi dalam permasalahan tersebut. "BPK tidak memberikan kesimpulan, tetapi hanya memberikan masukan agar menambah wawasan Pansus, apa saja yang bisa menjadi tindak pidana korupsi," jelas Erick.

Sementara ini, Pansus KP menemukan adanya beberapa hal yang bisa mengarah tindakan korupsi, seperti mengenai perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB). "Kita sedang menelusuri apakah di situ ada kerugian negara, persekongkolan atau lainnya," ujar Erick

Belum lagi proses penyerahan pengelolaan kepada PT Seroja Plaza Developer dari Pemkot Pontianak. Padahal, menurut Erick, kalau dikelola sendiri akan jauh lebih menguntungkan untuk meningkatkan kas daerah. "Apalagi adanya wewenang pengelola memungut biaya lebih tinggi dari

yang dibayarkan ke kas Pemkot Pontianak," ungkapnya.

Nilai yang lebih tinggi ditetapkan PT Seroja tersebut, jelas Erick, di antaranya mengenai sewa kios yang dibebankan kepada para pedagang. "Kalau itu dikelola Pemkot, tentunya lebih menguntungkan. Tetapi kenapa diserahkan ke PT Seroja untuk mengelolanya, lalu apa keuntungannya bagi Pemkot," tanyanya.

Terkait persoalan itu, kata Erick, Pansus KP juga memanggil Mantan Walikota Pontianak, dr Buchary A Rahman. Karena perjanjian antara Pemkot Pontianak dengan PT Seroja itu berlangsung pada zamannya menjadi kepala daerah.

Tetapi pemanggilan tersebut dijadwal ulang, karena Mantan Walikota Buchary sedang di Jakarta. Belum lagi karena adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk para legislator di Jakarta yang mengharuskan seluruh anggota DPRD Kota Pontianak mengikutinya. (dlk)